

PETUNJUK TEKNIS

Penyusunan

Statistik Ketahanan Pangan

2021



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN STATISTIK KETAHANAN PANGAN



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

2021

TIM PENYUSUN

- Pengarah : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
- Penanggung Jawab : Koordinator Kelompok Substansi Evaluasi, Data dan Informasi serta Hubungan Masyarakat
- Penyunting : Subkoordinator Kelompok Substansi Data dan Informasi
- Penulis Naskah : 1. Tri Aris Indrayanto, SP, M.Si (AKP Muda)
2. Yanti Nurhayanti, S.Si., M.S.E. (Statistisi Muda)
3. Koko Arie Bowo, S.Si (Statistisi Pertama)
4. Markazul Adabiyah, S.Stat (Statistisi Pertama)
5. Toni Tri Susanto, S.Si (Statistisi Pertama)

KATA PENGANTAR

Tersedianya data ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam mengestimasi dan menilai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, memprediksi situasi ketahanan pangan, serta sebagai dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan.

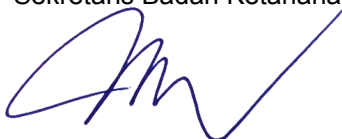
Kegiatan pengumpulan, validasi, dan *updating* data ketahanan pangan dimaksudkan untuk mendapatkan data ketahanan pangan yang *reliable* sesuai kondisi riil di lapangan. Sedangkan kegiatan pengolahan dan analisis data dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terstruktur yang dapat digunakan untuk kepentingan analisis lebih lanjut, perumusan, dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan

Guna membantu kelancaran kegiatan pengumpulan, pengolahan, *updating*, dan analisis data, maka buku Petunjuk Teknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan ini disusun sebagai acuan bagi aparat pengelola data ketahanan pangan di daerah.

Petunjuk teknis ini merupakan salah satu upaya Badan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan mutu statistik ketahanan pangan yang pada akhirnya diharapkan dapat memantapkan program-program pembangunan ketahanan pangan.

Jakarta, April 2021

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan,



Dr. Anas, S.Sos, M.M

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Output	2
1.5. Ruang Lingkup Kegiatan	2
1.6. Landasan Hukum	3
BAB II. PELAKSANAAN	4
2.1. Metode Pengumpulan Data	4
2.2. Data Dukung	5
2.3. Frekuensi Pengumpulan Data	5
2.4. Kualifikasi Data yang Dikumpulkan	6
2.5. Mekanisme Pengumpulan Data	6
BAB III. PENGOLAHAN DATA	7
3.1. Aspek Ketersediaan Pangan	7
3.2. Aspek Keterjangkauan Pangan	26
3.3. Aspek Pemanfaatan Pangan	28
3.4. Data Pendukung Ketahanan Pangan	30
BAB IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA	36
4.1. Organisasi	36
4.2. Tata Kerja	37

BAB V. PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PELAPORAN	40
5.1. Pemantuan	40
5.2. Pembinaan	40
5.3. Pelaporan	40
BAB VI. PEMBIAYAAN	41
BAB VII. PENUTUP	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan Angka/Konversi pada Gabah/Beras	8
Tabel 2. Penggunaan Angka/Konversi pada Beras untuk Non Pangan	8
Tabel 3. Penggunaan Angka/Konversi pada Kebutuhan Beras	9
Tabel 4. Penggunaan Angka/Konversi pada Jagung	10
Tabel 5. Penggunaan Angka/Konversi pada Kedelai	12
Tabel 6. Penggunaan Angka/Konversi pada Gula Pasir	13
Tabel 7. Penggunaan Angka/Konversi pada Minyak Goreng	14
Tabel 8. Penggunaan Angka/Konversi pada Bawang Merah	15
Tabel 9. Penggunaan Angka/Konversi pada Bawang Putih	16
Tabel 10. Penggunaan Angka/Konversi pada Cabai Besar	17
Tabel 11. Penggunaan Angka/Konversi pada Cabai Rawit	18
Tabel 12. Penggunaan Angka/Konversi pada Daging Sapi/Kerbau	19
Tabel 14. Penggunaan Angka/Konversi pada Daging Ayam Ras	19
Tabel 15. Penggunaan Angka/Konversi pada Telur Ayam Ras	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Ketahanan Pangan dibangun berdasarkan tiga pilar yaitu : (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal.

Pencapaian pembangunan ketahanan pangan sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak terlepas dari ketersediaan data yang berkesinambungan dalam berbagai tahapan pembangunan ketahanan pangan, mulai dari perencanaan, pemantauan hingga evaluasi. Tersedianya *statistik* ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam mengestimasi dan menilai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan, serta memprediksi situasi ketahanan pangan sebagai isyarat dini untuk upaya perbaikan sehingga *statistik* ketahanan pangan sangat diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan.

Ketersediaan data secara *time series* merupakan bagian penting dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan dari suatu manajemen program. Melalui *statistik* yang tersedia secara cepat, akurat, dan dapat diyakini kebenarannya diharapkan dapat memberikan ketepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan di berbagai jenjang.

Dalam era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah mempunyai hak otonomi untuk mengatur, memecahkan permasalahan dan merumuskan kebijakan untuk wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu ketersediaan data dan peningkatan kemampuan analisis sangat diperlukan di daerah terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan. Di sisi lain, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi terutama oleh daerah dalam pengumpulan data dan penyusunan statistik ketahanan pangan, yaitu: 1) belum semua daerah memiliki petugas yang khusus menangani data dan statistik, sementara petugas yang sudah ada masih memerlukan pelatihan khusus dan terkadang merangkap tugas lain; 2) dukungan sarana pengelolaan statistik masih kurang, baik *software* maupun *hardware*; dan 3) alokasi dana yang tersedia di daerah untuk mengumpulkan dan menyusun statistik ketahanan pangan masih terbatas.

Data yang dibutuhkan dalam menyusun statistik dan menganalisis ketahanan pangan bersumber dari berbagai sektor dan sub sektor, sehingga sangat bergantung pada ketersediaan dan tingkat kevalidan data yang tersedia. Untuk menjamin kontinuitas data, perlu adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait sebagai penyedia data melalui wadah koordinasi lembaga ketahanan pangan daerah.

Mengingat pentingnya ketersediaan informasi ketahanan pangan terhadap kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah, maka diperlukan petunjuk teknis penyusunan statistik ketahanan pangan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari Petunjuk Teknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan yaitu:

- a. Sebagai acuan dalam mengumpulkan dan mengolah data ketahanan pangan;
- b. Sebagai acuan dan menyusun statistik ketahanan pangan;

1.3. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan yaitu:

- a. Tersedianya acuan dalam mengumpulkan dan mengolah data ketahanan pangan;
- b. Terlaksananya penyusunan statistik ketahanan pangan secara sinkron dan terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah.

1.4. Output Yang Diharapkan

Tersusunnya Buku Statistik Ketahanan Pangan.

1.5. Ruang Lingkup Kegiatan

Keberhasilan statistik ketahanan pangan sangat tergantung pada ketersediaan data secara berkelanjutan yang diperoleh dari berbagai sektor dan subsektor. Mengingat masalah ketahanan pangan bersifat sangat kompleks, maka ruang lingkup kegiatan pengumpulan dan penyusunan statistik ketahanan pangan meliputi aspek ketahanan pangan, yaitu : (a) ketersediaan pangan, (b) keterjangkauan pangan, dan (c) pemanfaatan pangan. Selain itu, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan sangat penting dalam statistik ketahanan pangan.

1.6. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, mengisyaratkan dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengisyaratkan Sistem Informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) yang mencakup aspek ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia dan kerja sama internasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
- h. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

a. Metodologi pengumpulan data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan sistem monitoring, evaluasi, dan pengisian form oleh daerah, sedangkan data nasional dihimpun dari berbagai sumber dan sektor yang dikompilasi oleh Pusat.

b. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu petani, pedagang, pemilik penggilingan. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari instansi lain. Sumber data sekunder dari instansi terkait meliputi :

- 1) Data dari Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- 2) Data dari luar Kementerian Pertanian bersumber dari : Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Perum Bulog, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan
- 3) Data dari daerah pada Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Jenis data ketahanan pangan dapat disesuaikan kebutuhan wilayah. Data yang dikumpulkan meliputi:

1) Aspek Ketersediaan

- a) Ketersediaan Pangan Pokok Strategis
- b) Neraca Pangan Pokok Strategis
- c) Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan
- d) Prognosa Ketersediaan dan kebutuhan Pangan Strategis
- e) Stok Gabah/Beras di tingkat penggilingan
- f) Stok Pangan Strategis di tingkat pedagang
- g) Cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan cadangan pangan masyarakat)
- h) Cadangan pangan strategis di Bulog

2) Aspek Keterjangkauan Pangan

- a) Perkembangan harga GKP di tingkat petani

- b) Perkembangan harga GKG di tingkat penggilingan
 - c) Perkembangan harga komoditas pangan strategis tingkat produsen
 - d) Perkembangan harga komoditas pangan strategis tingkat konsumen
- 3) Aspek Pemanfaatan Pangan
- a) Konsumsi Pangan Berdasarkan Kelompok Jenis Pangan
 - b) Angka Konsumsi Energi Penduduk
 - c) Angka Konsumsi Protein Penduduk
 - d) PPH Konsumsi Pangan

2.2. Data Dukung

Untuk bahan informasi dan analisis ketahanan pangan, perlu dikumpulkan data pendukung, seperti :

- a. Jumlah Penduduk Rawan Pangan melalui PoU
- b. Indeks Ketahanan Pangan
- c. Statistik Keamanan Pangan Segar (Jumlah unit rumah pengemasan yang telah diregistrasi; Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah terdaftar; Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah disertifikasi Prima 1, 2 dan 3; Jumlah Health Certificate yang telah dikeluarkan).
- d. Kelembagaan Unit Ketahanan Pangan Daerah
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Strategis (PUPM, TTI, LPM, PIPL, KRPL, PKU, OPAL)
- f. Sumberdaya Manusia Bidang Pangan sesuai dengan Jabatan Fungsional
- g. Anggaran per Satuan Kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan

2.3. Frekuensi Pengumpulan data

Frekuensi pengumpulan data tergantung dari data yang dikumpulkan dan ketersediaan data di instansi yang mengumpulkan data. Data ketahanan pangan yang dihimpun secara berkala (*time series*) dengan frekuensi harian/mingguan/bulanan/tahunan/situasional. Data yang dikumpulkan mulai dari petani/pedagang/penggilingan/kabupaten/provinsi/nasional.

2.4. Kualifikasi Data yang Dikumpulkan

Untuk menghasilkan suatu rumusan kebijakan yang baik, data yang dikumpulkan harus memenuhi kualifikasi yang baik yaitu :

- a) *Reliabel*, yaitu data yang obyektif tepat gambaran sesuai di lapangan;
- b) Akurat, yaitu data yang tepat ukuran dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) *Up to date* dan *timely*, yaitu data yang dapat diakses secara tepat waktu;
- d) Lengkap mencakup data penunjang atau pendukung lainnya.

2.5. Mekanisme Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data ketahanan pangan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi penyedia data produksi pangan dari komoditas pangan utama, impor/ekspor dan pengeluaran/pemasukan pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganeekaragaman bahan pangan, mutu gizi dan keamanan bahan pangan, serta aspek lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi form data yang telah disiapkan sesuai dengan masing-masing subsistem.

Pengumpulan data ketahanan pangan dilakukan oleh petugas data Badan Ketahanan Pangan Pusat, Petugas Data Dinas Pangan Provinsi dan Petugas Data Dinas Pangan Kabupaten/Kota. Dalam mengumpulkan data juga berkoordinasi dengan *stakeholder*.

BAB III

PENGOLAHAN DATA

3.1. Aspek Ketersediaan Pangan

a) Ketersediaan Pangan Pokok/Strategis

Perhitungan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok/Strategis dilakukan dengan memperhitungkan parameter-parameter dan asumsi sebagai berikut:

1. Beras

- a. Ketersediaan beras diperhitungkan dengan menambahkan stok awal (*carry over*) dan produksi berdasarkan angka ramalan/angka sementara tahun berjalan. Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan beras nasional yaitu:
 - Stok awal tahun/bulan adalah stok akhir tahun/bulan sebelumnya, yang ada di Pemerintah (Perum BULOG) dan masyarakat (Pedagang, Penggilingan, Lumbung Pangan Masyarakat/LPM, dan/atau lainnya).
 - Produksi beras dihitung dari:
 - ✓ Produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang tersedia = angka produksi GKG berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS dikurangi dengan penggunaan GKG sebesar 7,3 persen untuk benih 0,9 persen, pakan 0,4 persen, industri non makanan 0,6 persen dan tercecer/susut 5,4 persen (BPS, NBM).
 - ✓ Produksi beras = produksi GKG yang tersedia dikalikan dengan angka konversi gabah menjadi beras. Angka konversi GKG menjadi beras sebesar 64,02 persen (Hasil SKGB BPS, 2018).
 - ✓ Produksi beras siap konsumsi = produksi beras dikurangi penggunaan beras non pangan.
 - ✓ Penggunaan beras non pangan sebesar 3,3 persen untuk pakan ternak/unggas 0,17 persen, industri non pangan 0,66 persen dan tercecer/susut 2,50 persen (BPS-NBM).
 - ✓ Produksi bulanan didasarkan realisasi dan/atau perkiraan luas panen dikalikan produktivitas, berdasarkan KSA BPS dan/atau data Ditjen Tanaman Pangan-Pusdatin Kementan.

- b. Kebutuhan beras total nasional sebesar 111,58 kg/kap/th (BPS, 2018). Dengan konsumsi langsung rumah tangga (RT) 94,47 kg/kap/th (Susenas 2020 Triwulan I), maka kebutuhan diluar rumah tangga 17,11 kg/kap/th.
- Total kebutuhan = kebutuhan per kapita dikalikan jumlah penduduk;
 - Konsumsi langsung RT = konsumsi berdasarkan SUSENAS Triwulan I 2020 dikalikan dengan jumlah penduduk;
 - Konsumsi diluar RT = selisih total kebutuhan dengan konsumsi langsung.
- c. Surplus/Defisit diperhitungkan dengan dua cara:
- Neraca Domestik (Surplus/defisit produksi) = Produksi bersih dikurangi dengan kebutuhan total.
 - Neraca Kumulatif (Surplus/defisit kumulatif) = Surplus/defisit produksi ditambah stok awal tahun/bulan sebelumnya.

Tabel 1. Penggunaan Angka/Konversi pada Gabah/Beras

URAIAN	ANGKA KONVERSI	SUMBER DATA
Stok Awal		masyarakat (Pedagang, Penggilingan, Lumbung Pangan Masyarakat/LPM, dan/atau lainnya)
Produksi		KSA-BPS dan/atau PDPS Pusdatin-Ditjen TP Kementan
Penggunaan GKG:	7,30%	BPS
a. Bibit/Benih	0,90%	
b. Pakan Ternak	0,40%	
c. Bahan Baku Industri Non Makanan	0,60%	
d. Susut/tercecer	5,40%	
Konversi GKG ke beras	64,02%	Hasil SKGB 2018, BPS

Tabel 2. Penggunaan Angka/Konversi pada Beras untuk Non Pangan

URAIAN	ANGKA KONVERSI	SUMBER DATA
Penggunaan Beras untuk Non Pangan:	3,33%	BPS
a. Pakan	0,17%	
b. Industri Non Pangan	0,66%	
c. Tercecer/Susut	2,50%	

Tabel 3. Penggunaan Angka/Konversi pada Kebutuhan Beras = (angka konversi x jumlah penduduk)/1000

URAIAN	ANGKA KONVERSI	SUMBER DATA
Total Kebutuhan Beras	111,58 Kg/Kap/Th	BPS 2018
Konsumsi Langsung RT	94,47 Kg/Kap/Th	Susenas Triwulan I 2020
Konsumsi di luar RT (Pakan dan Industri Non Pangan)	17,11 Kg/Kap/Th	Selisih Total Kebutuhan dengan Konsumsi Langsung (RT)

2. Jagung

a. Ketersediaan jagung diperhitungkan dari produksi ditambah stok awal (*carry over*). Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan jagung sebagai berikut:

- Stok awal tahun/bulan merupakan stok akhir tahun/bulan sebelumnya yang ada di Pemerintah (Perum BULOG) dan masyarakat (pelaku usaha seperti Gabungan Pengusaha Makanan Ternak/GPMT, pedagang, asosiasi, dan/atau lainnya);
- Produksi jagung merupakan jagung dalam bentuk pipilan kering (JPK) yang bersumber dari BPS dan/atau Ditjen Tanaman Pangan;
- Produksi jagung kotor merupakan JPK yang bersumber dari angka produksi yang dikeluarkan oleh BPS dan/atau Ditjen Tanaman Pangan, umumnya mempunyai kadar air 20-25%;
- Produksi jagung untuk pakan ternak merupakan JPPK yang bersumber dari angka produksi yang dikeluarkan oleh BPS dan/atau Ditjen Tanaman Pangan yang mempunyai kadar air 15%;
- Konversi JPK dari kadar air 20-25% ke JPK kadar air 15% sebesar 87%, bersumber dari Pusdatin-Ditjen Tanaman Pangan.

b. Kebutuhan jagung terdiri dari konsumsi langsung RT, kebutuhan benih, kebutuhan industri pakan ternak, kebutuhan pakan peternak lokal, kebutuhan industri pangan dan non pakan, serta kehilangan (susut/tercecer). Angka tersebut diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut :

- Konsumsi langsung = konsumsi berdasarkan Susenas Triwulan I 2020 (sebesar 1,67 kg/kap/th) dikalikan dengan jumlah penduduk;

- Kebutuhan benih sebesar 20 kg/ha dari luas tanam, berasal dari rerata penggunaan benih jagung lokal sebesar 25 kg/ha dan benih jagung hibrida 15 kg/ha (Ditjen. Tanaman Pangan);
 - Kebutuhan jagung untuk industri pakan sebesar 6,85 juta ton dengan ka 15% (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020);
 - Kebutuhan jagung untuk pakan peternak lokal sebesar 3,48 juta ton dengan ka 15% (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020);
 - Kebutuhan Industri merupakan kebutuhan jagung untuk industri pangan dan non pakan sebesar 6,01 juta ton (perhitungan dari produksi JPK ka 15% dikalikan angka konversi hasil kajian Tabel Input-Output, 2015, BPS-Pusdatin Kementan);
 - Kehilangan (tercecer/susut) sebesar 7,16% dari produksi JPK dengan kadar air 15% (NBM tahun 2019); dan
 - Sebaran kebutuhan bulanan jagung untuk pakan ternak didasarkan pada volume sebaran kebutuhan jagung sesuai dengan peningkatan kebutuhan pakan untuk memenuhi peningkatan produksi pada periode HBKN, dimana sebarannya 3 bulan sebelum periode HBKN.
- c. Stok akhir jagung diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 4. Penggunaan Angka/Konversi pada Jagung

Uraian	Angka/ Konversi	Keterangan
Konversi JPK Ka 20- 25% Ke JPK Ka 15%	Produksi di konversi 72% lalu dikali dengan 87%	Angka koreksi Pusdatin- Ditjen Tanaman Pangan (Februari 2020)
Konsumsi langsung (RT)	1,67 kg/kap/th	Susenas Triwulan I 2020
Kebutuhan Benih	20 kg/ha kali luas tanam (dari rata-rata penggunaan benih sebesar 25 kg/ha jagung lokal dan 15 kg/ha jagung hibrida)	Ditjen Tanaman Pangan

Uraian	Angka/ Konversi	Keterangan
Kebutuhan Jagung untuk Industri Pakan	8,59 juta ton	Ditjen. PKH Kementan
Kebutuhan Jagung untuk Peternak Lokal	2,92 juta ton	Ditjen. PKH Kementan
Kebutuhan Industri Pangan dan non Pakan	20,95%	Hasil Kajian Tabel Input Output 2015, BPS-Pusdatin Kementan
Kehilangan (tercecer)	7,16 %	NBM

3. Kedelai

- a. Ketersediaan kedelai diperhitungkan dari produksi ditambah stok awal (*carry over*). Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan kedelai sebagai berikut:
 - Stok awal tahun/bulan bisa diperhitungkan dari stok akhir tahun/bulan sebelumnya yang ada di pelaku usaha (pedagang/pengrajin tahu dan tempe) dan/atau stok di Pemerintah (Perum BULOG).
 - Angka produksi kedelai merupakan angka yang dikeluarkan oleh BPS dan/atau Ditjen. Tanaman Pangan, dalam bentuk kedelai kering.
- b. Kebutuhan kedelai terdiri dari konsumsi langsung rumah tangga (RT), kebutuhan hotel-restoran-katering (horeka), kebutuhan penyedia makanan dan minuman (PMM), kebutuhan industri (besar, sedang/ menengah, kecil dan mikro), kebutuhan benih, dan kehilangan (tercecer/ susut), diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut:
 - Konsumsi langsung, kebutuhan horeka, PMM, dan industri, berdasarkan Survei Bahan Pokok BPS Tahun 2017;
 - Penggunaan benih sebesar 50 kg/ha dari luas tanam, berdasarkan data Ditjen. Tanaman Pangan;
 - Angka kehilangan (tercecer/susut) sebesar 5 % dari produksi, bersumber dari BPS atau NBM.
- c. Stok akhir kedelai diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dengan kebutuhan.

Tabel 5. Penggunaan Angka/Konversi pada Kedelai

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung (RT)	0,05 Kg/Kap/Th	Survei Bahan Pokok BPS Tahun 2017
Horeka dan PMM Lainnya	0,37 Kg/Kap/Th	
Industri (besar, sedang, IMK)	11,47 Kg/Kap/Th	
Kebutuhan benih	50 Kg dari luas tanam	Ditjen TP
Kehilangan/tercecer	5% dari produksi	BPS dan NBM

4. Gula Pasir

a. Ketersediaan gula pasir diperhitungkan dari stok awal, total produksi gula kristal putih (GKP) dan impor (termasuk impor untuk industri makanan dan minuman). Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan gula pasir yaitu:

- Stok awal tahun/bulan dapat dihitung dari stok akhir tahun/bulan sebelumnya yang ada di Pemerintah (Perum BULOG dan Pabrik Gula/ PG) dan/atau masyarakat (pelaku usaha, pedagang dan lainnya).
- Stok awal tahun adalah sisa cadangan gula yang belum dikonsumsi untuk memenuhi tiga bulan berikutnya, terdiri dari stok gula rafinasi dan stok *raw sugar*.
- Angka produksi gula merupakan angka sasaran/taksasi dari Ditjen. Perkebunan. Total produksi merupakan penjumlahan Eks Tebu Giling ditambah *Idle Capacity ex raw Sugar*. *Idle capacity ex raw sugar* adalah produksi gula dari raw sugar untuk memenuhi kapasitas pabrik pada saat tidak tersedianya tebu. Konversi *raw sugar* menjadi gula kristal putih sebesar 94 persen (*idle capacity*).

b. Kebutuhan gula pasir terdiri dari konsumsi langsung RT, kebutuhan hotel-restoran-katering (Horeka), kebutuhan rumah makan (RM), dan penyedia makanan-minuman (PMM), kebutuhan lainnya (jasa kesehatan dan jasa lainnya). Angka tersebut berdasarkan angka dari Ditjen. Perkebunan.

- Konsumsi langsung = konsumsi berdasarkan SUSENAS Triwulan I 2020 dikalikan dengan jumlah penduduk;
- Kebutuhan Horeka, RM, dan PMM berdasarkan estimasi dari Ditjen

Perkebunan dikalikan jumlah penduduk. Dasar penghitungan angka estimasi menggunakan angka Survei Bahan Pokok 2017 ; dan

- Kebutuhan lainnya (Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya) berdasarkan berdasarkan estimasi dari Ditjen Perkebunan dikalikan jumlah penduduk. Dasar penghitungan angka estimasi menggunakan angka Survei Bahan Pokok 2017.
- c. Stok akhir gula pasir diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 6. Penggunaan Angka/Konversi pada Gula Pasir

Uraian	Angka/ Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung RT	6,81 kg/kap/th	SUSENAS Triwulan I 2020, BPS-BKP Kementan
Horeka, RM dan PMM	3,44 kg/kap/th	Survei Bahan Pokok 2017 (BPS)-Ditjen. Perkebunan Kementan
Kebutuhan lainnya (Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya)	0,07 kg/kap/th	Survei Bahan Pokok 2017 (BPS)-Ditjen. Perkebunan Kementan

5. Minyak Goreng

- a. Ketersediaan minyak goreng diperhitungkan dari produksi dan stok awal tahun/bulan. Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung ketersediaan minyak goreng:
- Data stok CPO dan minyak goreng sementara mengacu data dari BPS, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Industri Makanan dan Minuman Indonesia (AIMMI); dan
 - Total produksi minyak goreng adalah penjumlahan minyak goreng dari CPO dan kopra, dengan asumsi rendemen minyak goreng CPO 68,28 persen dan kopra 60 persen (Ditjen Perkebunan).
- b. Kebutuhan minyak goreng terdiri dari konsumsi langsung dan konsumsi tidak langsung, diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut:
- Konsumsi langsung (RT) = konsumsi (minyak CPO dan minyak kopra) berdasarkan Susenas Triwulan I 2020 BPS dikali jumlah penduduk;

- Industri, berdasarkan angka estimasi dari Ditjen. Perkebunan; dan
 - Angka kehilangan (tercecer) yang digunakan dalam perhitungan prognosa minyak goreng = 1,56 % dari produksi (NBM).
- c. Stok akhir minyak goreng diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit antara ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 7. Penggunaan Angka/Konversi pada Minyak Goreng

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung RT	8,82 kg/kap/th	SUSENAS Triwulan I 2020
Industri	-	Estimasi Ditjen. Perkebunan, 2020
Kehilangan/ tercecer	1,56%	NBM 2019

6. Bawang Merah

- a. Ketersediaan bawang merah diperhitungkan dari produksi dan stok awal tahun/bulan. Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung produksi bawang merah sebagai berikut:
- Stok awal tahun/bulan dapat diperhitungkan dari stok akhir tahun/bulan sebelumnya yang ada di Pemerintah (Perum BULOG) dan masyarakat (petani/pedagang/asosiasi/lainnya);
 - Angka produksi merupakan angka sasaran/semantara/tetap produksi bawang merah dalam bentuk rogol, bersumber dari BPS atau Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (mengacu pengaturan/manajemen pola produksi setiap tahun yang disepakati melalui pertemuan koordinasi dengan daerah);
- b. Kebutuhan bawang merah terdiri dari konsumsi langsung RT, kebutuhan untuk benih/bibit, kebutuhan untuk hotel-restoran-katering (Horeka), kebutuhan untuk industri, dan kehilangan (tercecer/susut). Angka tersebut diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut :
- Konsumsi langsung RT = konsumsi berdasarkan SUSENAS Triwulan I 2020 dikalikan dengan jumlah penduduk; dan
 - Kebutuhan untuk benih/bibit, horeka, industri dan tercecer menggunakan estimasi perhitungan dari Ditjen Hortikultura.
- c. Stok akhir bawang merah diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 8. Penggunaan Angka/Konversi pada Bawang Merah

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung RT	2,802 kg/kap/th	SUSENAS Triwulan I 2020
Kebutuhan Benih	12,92% x Luas Tanam	Estimasi Ditjen Hortikultura
Kebutuhan Horeka, RM dan PMM	5% x Konsumsi RT	
Kebutuhan Industri	5% x Konsumsi RT	
Kehilangan (Tercecer) a. Penyediaan konsumsi b. Horeka c. Industri d. Ekspor e. Benih	Penjumlahan dari : a. 36% x Konsumsi RT b. 25% x Kebutuhan Horeka c. 25% x Kebutuhan Industri d. 20% x Kebutuhan Ekspor e. 60% x Kebutuhan benih	

7. Bawang putih

- a. Ketersediaan bawang putih diperhitungkan dari produksi dan stok awal tahun/bulan. Secara umum penjelasan parameter yang diperhitungkan untuk menghitung produksi bawang merah sebagai berikut:
 - Stok awal tahun/bulan dapat diperhitungkan dari stok akhir tahun/bulan sebelumnya yang ada di Pemerintah (Perum BULOG) dan masyarakat (pedagang/asosiasi/lainnya);
 - Angka produksi merupakan sasaran/angka sasaran/ sementara/ tetap produksi dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian.
- b. Kebutuhan bawang putih terdiri dari konsumsi langsung RT, kebutuhan untuk benih/bibit, kebutuhan untuk industri, dan kehilangan (tercecer). Angka-angka tersebut diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut :
 - Konsumsi langsung RT = konsumsi berdasarkan SUSENAS Triwulan I 2020 dikalikan dengan jumlah penduduk;
 - Kebutuhan untuk benih/bibit, horeka, industri dan tercecer menggunakan estimasi perhitungan dari Ditjen Hortikultura.
- c. Stok akhir diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 9. Penggunaan Angka/Konversi pada Bawang Putih

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung	1,806 kg/kap/th	SUSENAS Triwulan I 2020
Kebutuhan Benih	0,5% x Luas Tanam	Estimasi Ditjen Hortikultura
Kebutuhan Horeka, RM dan PMM	10% x Konsumsi RT	
Kebutuhan Industri	5% x Konsumsi RT	
Kehilangan (Tercecer) a. Penyediaan konsumsi b. Horeka c. Industri	Penjumlahan dari : a. 10% x Konsumsi RT b. 5% x Kebutuhan Horeka c. 5% x Kebutuhan Industri	

8. Cabai Besar

a. Ketersediaan cabai besar hanya diperhitungkan dari produksi dan tidak memperhitungkan stok awal tahun/bulan. Secara umum parameter untuk menghitung ketersediaan cabai besar sebagai berikut:

- Tidak memperhitungkan stok awal tahun/bulan karena komoditas cabai tidak bertahan lama untuk disimpan (hanya bertahan 3-5 hari) sehingga tidak ada stok;
- Angka produksi merupakan angka sasaran/semestara/tetap produksi dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian yang mengacu pada pengaturan/manajemen pola produksi setiap tahun yang disepakati melalui pertemuan koordinasi dengan daerah.

b. Kebutuhan cabai besar terdiri dari konsumsi langsung RT, kebutuhan untuk benih/bibit, kebutuhan untuk industri, dan kehilangan (tercecer/ susut). Angka tersebut diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut :

- Konsumsi langsung RT = konsumsi berdasarkan SUSENAS Triwulan I 2020 dikalikan dengan jumlah penduduk; dan
- Kebutuhan untuk benih/bibit, horeka dan warung/PKL, industri besar dan UKMKM, dan kehilangan (tercecer/susut) menggunakan estimasi perhitungan dari Ditjen Hortikultura.
- Angka kehilangan (tercecer/susut) dan penggunaan lainnya yang

digunakan dalam perhitungan prognosa cabai besar angka estimasi perhitungan dari Ditjen Hortikultura.

- c. Stok akhir cabai besar diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 10. Penggunaan Angka/Konversi pada Cabai Besar

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung (RT)	2,364 kg/kap/th	SUSENAS Triwulan I 2020
Kebutuhan Benih	0,24% x Luas Tanam	Estimasi Ditjen Hortikultura
Kebutuhan Horeka, RM dan PMM	25% x Konsumsi RT	
Kebutuhan Industri	20% x Konsumsi RT	
Kehilangan (Tercecer) a. Penyediaan konsumsi b. Horeka c. Industri	Penjumlahan dari : a. 25% x Konsumsi RT b. 5% x Kebutuhan Horeka c. 3% x Kebutuhan Industri	

9. Cabai Rawit

- a. Ketersediaan cabai rawit hanya diperhitungkan dari produksi dan tidak memperhitungkan stok awal tahun/bulan. Secara umum penjelasan parameter untuk menghitung ketersediaan cabai sebagai berikut:
- Tidak diperhitungkan stok awal tahun/bulan karena komoditas cabai tidak bertahan lama untuk disimpan (hanya bertahan 3-5 hari) sehingga tidak ada stok; dan
 - Angka produksi merupakan angka sasaran/semestara/tetap produksi dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian yang mengacu pada pengaturan/manajemen pola produksi setiap tahun yang disepakati melalui pertemuan koordinasi dengan daerah.
- b. Kebutuhan cabai rawit terdiri dari konsumsi langsung RT, kebutuhan benih/bibit, kebutuhan horeka, RM dan PMM, kebutuhan untuk industri, dan kehilangan (tercecer/susut). Angka tersebut diperhitungkan dengan asumsi sebagai berikut:
- Konsumsi langsung RT = konsumsi berdasarkan SUSENAS Triwulan I 2020 dikalikan dengan jumlah penduduk; dan

- Kebutuhan untuk benih/bibit, horeka dan warung/PKL, industri besar dan UKMKM, menggunakan estimasi perhitungan dari Ditjen Hortikultura.
 - Kehilangan (tercecer/susut) menggunakan estimasi perhitungan dari Ditjen Hortikultura.
- c. Stok akhir cabai rawit diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 11. Penggunaan Angka/Konversi pada Cabai Rawit

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung (RT)	1,99 kg/kap/th	SUSENAS Triwulan I 2020
Kebutuhan Benih	0,29% x Luas Tanam	Estimasi Ditjen Hortikultura
Kebutuhan Horeka, RM dan PMM	34% x Konsumsi RT	
Kebutuhan Industri	25% x Konsumsi RT	
Kehilangan (Tercecer) a. Penyediaan konsumsi b. Horeka c. Industri	Penjumlahan dari : a. 25% x Konsumsi RT b. 10% x Kebutuhan Horeka c. 5% x Kebutuhan Industri	

10. Daging Sapi dan Kerbau

- a. Ketersediaan daging sapi dan kerbau diperhitungkan dengan menambahkan produksi (dalam bentuk daging murni) dan stok awal tahun/bulan. Stok awal tahun/bulan dapat diperhitungkan dari stok yang ada di Pemerintah (misal Perum BULOG) dan masyarakat (misal di pedagang, importir, dan lainnya).
- b. Kebutuhan daging sapi dan kerbau dihitung berdasarkan keputusan Rakor Bidang Peternakan tanggal 18 November 2019 , ditetapkan 2,66 kg/kap/th. Proyeksi konsumsi daging sapi dan kerbau tahun 2020 meningkat 3,91% dari tahun 2019, yaitu dari 2,56 kg/kapita/tahun menjadi 2,66 kg/kapita/tahun. Angka kebutuhan daging sapi/kerbau dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing provinsi di tahun 2019.
- c. Stok akhir daging sapi diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 12. Penggunaan Angka/Konversi pada Daging Sapi/Kerbau

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Kebutuhan daging sapi dan kerbau	2,66 kg/kap/th	Keputusan Rakornis Kemenko Perekonomian, 21 Januari 2019

11. Daging Ayam Ras

- Ketersediaan daging ayam ras dapat diperhitungkan dari produksi (dalam bentuk daging) dan stok awal tahun/bulan. Data stok awal tahun/bulan dapat diperhitungkan dari stok yang ada di pelaku usaha (pedagang/asosiasi/ industri/lainnya).
- Kebutuhan daging ayam ras sebesar 12,79 kg/kap/th, berdasarkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hasil susenas 2019 (BPS dalam Rakor Perunggasan tgl. 24 Januari 2020 di Kemenko Perekonomian Jakarta)
- Stok akhir daging ayam ras diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 13. Penggunaan Angka/Konversi pada Daging Ayam Ras

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung (RT)	5,47 kg/kap/th	BPS dalam Rakor Perunggasan tgl. 24 Januari 2020 di Kemenko Perekonomian Jakarta.
Horeka dan PMM Lainnya	6,08 kg/kap/th	
Industri (besar, Sedang, IMK)	1,21 kg/kap/th	
Jasa Kesehatan	0,03 kg/kap/th	
Total	12,79 kg/kap/th	

12. Telur Ayam Ras

- Ketersediaan telur ayam ras diperhitungkan dari produksi dan stok awal tahun/bulan. Stok awal tahun/bulan dapat diperhitungkan dari stok akhir tahun/bulan sebelumnya.
- Kebutuhan telur ayam ras tahun 2020 dihitung berdasarkan tingkat konsumsi per kapita sebanyak 18,16 kg/kapita.
- Proyeksi pertumbuhan 2020 konsumsi rumah tangga 0,23% (berdasarkan rata-rata pertumbuhan konsumsi RT hasil Susenas 2017 s.d. 2019), horeka, Rumah Makan dan PMM 3,2% (pertumbuhan perdagangan makanan dan minuman rata-

rata 6,41%), industri 3,54% (pertumbuhan industri makanan minuman rata-rata 7,78%).

- d. Stok akhir telur ayam ras diperhitungkan dengan menghitung surplus/defisit ketersediaan dan kebutuhan.

Tabel 14. Penggunaan Angka/Konversi pada Telur Ayam Ras

Uraian	Angka/Konversi	Keterangan
Konsumsi langsung (RT)	6,49 kg/kap/th	Rapat Koordinasi <i>Supply Demand</i> Daging Sapi/ Kerbau, Daging dan Telur Ayam Ras, Serta Susu Tahun 2020, 7 Februari 2020
Horeka dan PMM Lainnya	5,52 kg/kap/th	
Industri (besar, Sedang, IMK)	5,61 kg/kap/th	
Jasa Kesehatan	0,07 kg/kap/th	
Total	17,69 kg/kap/th	

b) Neraca Pangan Strategis

Neraca Pangan adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan/pengadaan (*supply*), penggunaan/pemanfaatan (*utilization*) pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu (dalam kurun waktu satu tahun).

Neraca Pangan memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya.

Penyediaan diperoleh dari jumlah total bahan pangan yang diproduksi dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah impor dan dikurangi dengan jumlah ekspor selama periode tersebut. Sedangkan penggunaan diperoleh dari jumlah total kebutuhan pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer, dan penggunaan lain serta bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi manusia. Ketersediaan pangan per kapita untuk dikonsumsi diperoleh dengan membagi ketersediaan bahan makanan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

c) PPH Ketersediaan Pangan

PPH Ketersediaan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut atau relatif terhadap total energi, baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu

mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa.

Cara menghitung PPH Ketersediaan adalah :

- 1) Mengelompokkan konsumsi energi bahan pangan dalam 9 kelompok PPH,
- 2) Menjumlahkan energi pangan dalam satu kelompok bahan pangan,
- 3) Menghitung persentase AKE kelompok bahan pangan dengan cara membandingkan konsumsi energi aktual dengan tingkat kecukupan gizi (AKG),
- 4) Menghitung skor AKE kelompok bahan pangan dengan cara persentase AKE dikalikan dengan bobot kelompok bahan pangan,
- 5) Menghitung skor PPH kelompok bahan pangan dengan cara membandingkan skor AKE kelompok bahan pangan dengan skor maksimal kelompok bahan pangan,

Menghitung skor PPH dengan cara menjumlahkan skor dari setiap kelompok bahan pangan.

Data dan informasi yang dikumpulkan diolah secara deskriptif, disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data disajikan dalam bentuk tabel secara *time series* disertai dengan laju pertumbuhannya.

d) Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis

Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok/Strategis merupakan informasi tentang kondisi produksi dan kebutuhan pangan yang disusun dalam format bulanan. Penyusunan prognosa dijadikan acuan dalam menentukan sasaran produksi, penyediaan pasokan dan perumusan langkah-langkah antisipasi pemenuhan kebutuhan.

Prognosa disusun berdasarkan kebutuhan dan angka sasaran produksi dari Ditjen/Dinas Teknis terkait lingkup Kementerian Pertanian. Selanjutnya prognosa tersebut akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perubahan angka ramalan dan/atau angka realisasi produksi Ditjen/Dinas Teknis terkait maupun BPS.

Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan disusun secara berkala, yaitu pada awal tahun berdasarkan angka sasaran produksi Ditjen/Dinas Teknis dan selanjutnya disempurnakan secara berkala sesuai dengan perubahan data produksi.

Dalam perhitungan penyusunan prognosa, variabel yang dihitung atau yang dicari berupa surplus/defisit, ketersediaan dan kebutuhan pangan.

Untuk menghitung variabel tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit : **Ketersediaan – Kebutuhan**

b. Ketersediaan : **Stok Awal + Produksi**

Stok awal antara lain diperhitungkan untuk stok yang dikelola oleh pemerintah (Perum BULOG) dan/atau masyarakat (Asosiasi, Pelaku Usaha, Industri, dan lainnya).

c. Kebutuhan :

Konsumsi Lansung (Rumah Tangga) + Kebutuhan di Luar Rumah Tangga (Kebutuhan Industri + Kebutuhan Bibit/Benih + Kebutuhan Pakan + Lainnya) + Kehilangan (Tercecer/Susut)

Komponen kebutuhan berbeda tiap komoditas pangan.

Selain variabel, untuk penyusunan prognosa juga menggunakan data/angka asumsi-asumsi yang sudah disepakati, antara lain yaitu:

- Peningkatan kebutuhan pada periode Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN): Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun baru menggunakan hasil Kajian BKP tahun 2018, kecuali komoditas jagung. Peningkatan kebutuhan jagung disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan pakan untuk memnuhi peningkatan produksi telur ayam ras pada priode HBKN, dimana sebaran bulanannya 3 bulan sebelum periode HBKN.
- Stok awal yang diperhitungkan adalah stok pangan yang dikuasai oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Asosiasi, Pelaku Usaha, Industri, dan lainnya).
- Sebaran produksi bulanan bersumber dari Ditjen. Teknis lingkup Kementerian Pertanian atau Dinas Teknis di Provinsi, Jika tidak tersedia, dapat menggunakan pola sebaran produksi bulanan rata-rata dalam 5 tahun terakhir.
- Angka kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya untuk komoditas yang tidak ada angka konversinya, seperti kedelai dan kacang tanah didekati dari selisih antara angka kebutuhan per kapita dalam NBM 2019 dengan angka konsumsi rumah tangga dalam SUSENAS Triwulan I 2020.
- Jumlah penduduk nasional tahun 2020 sebanyak 269.603.400 jiwa (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, SUPAS 2015, BPS), begitu juga untuk daerah (provinsi) mengacu pada data tersebut atau data BPS masing-masing provinsi.

- Produksi gula nasional tahun 2020 adalah penjumlahan dari eks tebu dan idle capacity eks Raw Sugar.
- Produksi minyak goreng adalah penjumlahan minyak goreng dari CPO dan kopra dengan asumsi rendemen minyak goreng dari CPO 68,28% dan kopra 60%.
- Kebutuhan total untuk minyak goreng adalah kebutuhan tahun lalu dinaikkan sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang bersumber dari Ditjen. Perkebunan (angka estimasi buku statistik perkebunan).

e) Stok Gabah/Beras di Tingkat Penggilingan

Stok Gabah di penggilingan adalah total jumlah gabah (GKP dan/atau GKG) di penggilingan (di gudang dan di lantai jemur) yang dimiliki/dikuasai oleh perusahaan penggilingan, dan tidak termasuk stok milik petani maupun pedagang yang berada di penggilingan, pada hari pengambilan data. Sedangkan Stok Beras di penggilingan adalah total jumlah beras di penggilingan yang dimiliki/dikuasai oleh perusahaan penggilingan, dan tidak termasuk stok milik petani maupun pedagang yang berada di penggilingan, pada hari pengambilan data.

Data dan informasi umum tentang penggilingan dikumpulkan pada awal pengumpulan data dengan mengisi kuesioner meliputi :

- 1) Nama penggilingan;
- 2) Nama pemilik/pengelola;
- 3) Alamat lengkap;
- 4) Titik koordinat lokasi penggilingan (menggunakan *open camera/google map*);
- 5) Nomor telepon/HP yang dapat dihubungi;
- 6) Kapasitas produksi per jam;
- 7) Jam operasional penggilingan per hari;
- 8) Jumlah tenaga kerja.

Data dan informasi stok mingguan dikumpulkan dengan mengisi kuesioner (pengambilan data setiap hari **Senin**), meliputi:

- 1) Nama penggilingan;
- 2) Jumlah kumulatif pasokan;
- 3) Stok GKP di penggilingan setiap minggu (pada hari Senin);
- 4) Rata-rata harga beli GKP satu minggu yang lalu;
- 5) Stok GKG di penggilingan setiap minggu (pada hari Senin);

- 6) Rata-rata harga beli GKG satu minggu yang lalu;
- 7) Stok beras medium di penggilingan setiap minggu (pada hari Senin);
- 8) Rata-rata harga jual beras medium satu minggu yang lalu;
- 9) Stok beras premium di penggilingan setiap minggu (pada hari Senin);
- 10) Rata-rata harga jual beras premium satu minggu yang lalu;
- 11) Kenaikan/penurunan stok minggu ini dibanding minggu yang lalu;
- 12) Wilayah asal sebagian besar gabah;
- 13) Wilayah tujuan penjualan sebagian besar beras.

f) Stok Pangan Strategis di Tingkat Pedagang

Jumlah stok pangan strategis (beras, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam, daging ayam, daging sapi, gula pasir) yang dimiliki/dikuasai oleh pedagang tersebut pada hari pengambilan data. Data dan informasi umum tentang pedagang dikumpulkan pada awal pengumpulan data dengan mengisi kuesioner, meliputi :

- 1) Nama tempat usaha;
- 2) Nama pemilik/pengelola;
- 3) Nomor telepon/HP yang dapat dihubungi;
- 4) Alamat lengkap;
- 5) Titik koordinat lokasi pedagang (menggunakan *open camera/google map*);
- 6) Omset penjualan per tahun;
- 7) Kepemilikan gudang;
- 8) Luas gudang;
- 9) Jumlah hari kerja dalam satu minggu;
- 10) Jumlah tenaga kerja.

Data dan informasi stok mingguan dikumpulkan dengan mengisi kuesioner (pengambilan data setiap hari Selasa), meliputi:

- 1) Nama Tempat Usaha/Pedagang;
- 2) Jumlah pasokan pangan strategis;
- 3) Stok pangan strategis yang ada di tempat usaha (pada hari Senin);
- 4) Rata-rata harga beli pangan strategis satu minggu yang lalu;
- 5) Rata-rata harga jual pangan strategis satu minggu yang lalu;
- 6) Asal pembelian pangan strategis;

7) Daerah penjualan pangan strategis;

8) Kenaikan/penurunan stok pangan strategis minggu ini dibanding minggu yang lalu.

g) Cadangan Pangan Masyarakat

Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat melalui Lumbung Pangan Masyarakat (LPM/LPM Desa). Komoditas yang dikelola pada setiap daerah tidak sama disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat atau desa.

Menunjukkan ketersediaan pangan di masyarakat berkurang, maka akan mengganggu cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Cara menghitung Cadangan Pangan Masyarakat Tingkat Nasional dan Provinsi, yaitu :

- Stok LPM Nasional = \sum Stok LPM Provinsi
- Stok LPM Provinsi = \sum Stok LPM kab/kota
- Stok LPM Kabupaten = \sum Stok LPM di wilayah kab/kota

h) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). Komoditas yang dikelola pada setiap daerah tidak sama disesuaikan dengan keputusan bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah.

Cara menghitung Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yaitu :

Stok akhir = pengadaan – penyaluran.

i) Cadangan Pangan Strategis di Bulog

Cadangan pangan strategis di Bulog merupakan cadangan nasional yang di kelola oleh Perum Bulog. Komoditas yang dikelola adalah beras, gula pasir, jagung, daging sapi, bawang merah, daging kerbau, tepung terigu, telur, minyak goreng, bawang putih. Data yang diperoleh bersumber dari Laporan Manejerial Bulog, yang terupdate setiap hari.

Volume Stok Pangan Strategis merupakan volume (berat) komoditas pangan strategis pada saat pelaporan. Jika volume stok pangan strategis > 0 berarti terdapat stok pangan strategis pada saat pelaporan.

Cara menghitung Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yaitu :

Stok akhir = pengadaan – penyaluran.

3.2. Aspek Keterjangkauan

a) Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen

Definisi harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen yaitu besaran harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen/petani lebih besar atau sama dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Satuan harga gabah kering panen di tingkat produsen yaitu Rp/Kg.

Dalam menghitung harga gabah kering panen di tingkat produsen, dengan cara: menghitung rata-rata harga harga gabah kering panen di tingkat produsen pada 34 provinsi.

b) Harga Gabah Kering Giling (GKG) di Tingkat Penggilingan

Definisi harga Gabah Kering Giling (GKG) di Tingkat Penggilingan yaitu besaran harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan lebih besar atau sama dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Satuan harga gabah kering giling di tingkat penggilingan yaitu Rp/Kg.

Dalam menghitung harga gabah kering giling di tingkat penggilingan, dengan cara: menghitung rata-rata harga harga gabah kering giling di tingkat penggilingan pada 34 provinsi.

c) Harga Pangan Strategis di Tingkat Produsen

Harga produsen adalah harga yang diterima oleh petani ketika menjual hasil bertaniya. Cakupan pangan strategis: padi (GKP,GKG), jagung, kedelai,cabe, bawang merah, Beras Premium, medium dan termurah tingkat penggilingan.

Dalam menghitung harga gabah kering panen di tingkat produsen, dengan cara: menghitung rata-rata harga harga gabah kering giling di tingkat produsen pada 34 provinsi.

Hasil perhitungan tersebut akan diinput ke aplikasi Panel Harga Pangan.

d) Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen

Harga konsumen adalah harga yang dibayarkan konsumen akhir di tingkat pedagang eceran. Cakupan pangan strategis: beras (premium, medium dan termurah), jagung,

kedelai, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng curah, dan gula pasir.

Dalam menghitung harga gabah kering giling di tingkat pedagang grosir dan eceran, dengan cara: menghitung rata-rata harga gabah kering giling di tingkat pedagang grosir dan eceran pada 34 provinsi.

Hasil perhitungan tersebut akan diinput ke aplikasi Panel Harga Pangan.

e) Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Produsen

Definisi koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan standar harga (STD) di tingkat produsen dengan nilai rata-rata (*average*) yang dinyatakan dengan persentase (%).

Koefisien variansi (CV) harga pangan untuk melihat sebaran harga di tingkat produsen pada suatu wilayah dari rata-rata harga.

Harga beras di tingkat produsen dikatakan stabil apabila $CV < 10$ persen, harga cabai merah di tingkat produsen dikatakan stabil apabila $CV < 29$ persen, harga bawang merah stabil di tingkat produsen dikatakan stabil apabila $CV < 19$ persen.

f) Koefisien Variasi Harga Pangan di Tingkat Konsumen

Definisi koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan standar harga (STD) di tingkat konsumen dengan nilai rata-rata (*average*) yang dinyatakan dengan persentase (%).

Koefisien variansi (CV) harga pangan (beras, cabai merah, bawang merah) untuk melihat tingkat fluktuasi harga di tingkat konsumen pada suatu wilayah dari rata-rata harga.

Harga beras di tingkat konsumen dikatakan stabil apabila $CV < 10$ persen, harga cabai merah di tingkat konsumen dikatakan stabil apabila $CV < 29$ persen, harga bawang merah stabil di tingkat konsumen dikatakan stabil apabila $CV < 19$ persen.

Dalam menghitung koefisien variansi (CV) di tingkat konsumen, dengan cara : menghitung rata-rata harga pangan di tingkat konsumen/pedagang pada 34 provinsi.

3.3. Aspek Pemanfaatan Pangan

a) Konsumsi Pangan Berdasarkan Kelompok Jenis Pangan

Konsumsi pangan penduduk dihitung dengan menjumlahkan bahan pangan per jenis komoditas, baik bentuk asal maupun olahannya. Untuk bahan pangan olahan, sebelum dijumlahkan, terlebih dahulu dikonversikan ke bentuk asalnya menggunakan angka konversi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan analisis data konsumsi pangan penduduk besarnya konsumsi pangan dihitung dari jumlah konsumsi pangan yang disiapkan/dimasak di rumah tangga ditambahkan konsumsi yang berasal dari makanan jadi/makanan jajanan dan konsumsi lainnya. Untuk konsumsi pangan yang berasal dari konsumsi lainnya dan makanan jadi, penjumlahan dilakukan setelah dikonversi ke komoditas asalnya.

Sebagai contoh :

Konsumsi beras, penjumlahan dari:

{Konsumsi beras yang dimasak dirumah tangga (beras, beras ketan, tepung beras)}
+ {konsumsi lainnya (bihun, bubur bayi dan kue basah)} + {makanan jadi (nasi campur, nasi goreng, lontong sayur, nasi putih dan bubur ayam)}.

Konsumsi singkong, penjumlahan dari:

{Konsumsi singkong yang dimasak dirumah tangga (singkong, gaplek)}
+ {konsumsi lainnya (kerupuk)}

b) Konsumsi Energi Penduduk (kkal/kap/hari)

Konsumsi energi penduduk dihitung dengan mengalikan jumlah pangan yang dikonsumsi dengan konversi bahan pangan dan kandungan energi per 100 gram bahan pangan tersebut. Total konsumsi energi penduduk setiap tahun dibandingkan dengan rata-rata Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ditetapkan bagi orang Indonesia. Berdasarkan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke XI Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi bangsa Indonesia rata-rata AKE adalah 2.100 kkal/kap/hari.

c) Konsumsi Protein Penduduk (gram/kap/hari)

Konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari) dihitung dengan mengalikan jumlah pangan dikonsumsi dengan konversi bahan pangan dan kandungan protein per 100 gram bahan pangan tersebut. Total konsumsi protein penduduk setiap tahun dibandingkan dengan rata-rata Angka Kecukupan Protein (AKP). Berdasarkan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke XI Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi bangsa Indonesia rata-rata AKP adalah 57 gram/kap/hari.

d) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH menggambarkan atau keragaman konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Langkah-langkah penghitungan skor Pola Pangan Harapan sebagai berikut:

1. Pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok pangan yang mengacu pada standar Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk, jenis dengan satuan yang berbeda. Oleh karena itu, satuan beratnya perlu diseragamkan dengan cara mengkonversikan ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama (yang disepakati) dengan menggunakan faktor konversi sehingga dapat dijumlahkan beratnya, sebaiknya pangan yang dikonsumsi dikonversi ke dalam berat mentah.
3. Menghitung kandungan energi setiap jenis pangan yang dikonsumsi dengan bantuan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM).

4. Menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan, sehingga akan diketahui total energi dari seluruh kelompok pangan.
5. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE).
6. Menghasilkan kontribusi AKE (% AKE) setiap kelompok pangan dengan bobotnya masing-masing.
7. Skor PPH aktual dihitung dengan cara membandingkan skor AKE dengan skor maksimum. Skor maksimum adalah batas maksimum setiap kelompok pangan yang memenuhi komposisi ideal. Penghitungan skor PPH masing-masing kelompok pangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jika skor AKE lebih tinggi dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor maksimum
 - Jika skor AKE lebih rendah dari skor maksimum, maka yang digunakan adalah skor AKE.
8. Menjumlahkan skor PPH dari 9 kelompok pangan yang kemudian disebut skor PPH Konsumsi Pangan.

e) Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji

Tingkat keamanan pangan segar yang diuji adalah jumlah *sample* pangan yang aman dikonsumsi dibandingkan dengan total *sample* pangan disuatu tempat pada kurun waktu tertentu. Tingkat keamanan pangan segar yang aman adalah diatas atau sama dengan 80 persen dari kondisi yang ada.

Dalam menghitung tingkat keamanan pangan segar yang diuji, dengan cara menjumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di suatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, dibagi jumlah total sampel pangan yang diambil di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu, dikalikan 100 persen.

3.4. Data Pendukung Ketahanan Pangan

a) Jumlah unit rumah pengemasan yang telah diregistrasi

Jumlah unit penanganan rumah pengemasan yang telah diregistrasi oleh OKKPP/OKKPD. Jumlah Rumah Pengemasan yang telah diregistrasi oleh OKKP pada tahun tertentu.

Cara menghitung yaitu Jumlah Packing House (PH) = Jumlah PH di 34 OKKPD + Jumlah PH di OKKPP.

b) Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi Prima 1, 2, 3

Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi adalah jumlah pangan segar yang telah diberikan jaminan tertulis oleh lembaga yang telah diakreditasi pada tahun tertentu (y) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (y-1). Peningkatan produk pangan segar tiap tahun ditetapkan sebesar 10 persen.

Cara menghitung jumlah peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi pada tahun tertentu adalah jumlah pangan segar pada tahun tertentu dikurangi dengan jumlah pangan segar pada tahun sebelumnya, selanjutnya dibagi jumlah pangan segar pada tahun sebelumnya dikalikan 100 persen.

c) Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah terdaftar

PSAT yang telah didaftarkan dan memiliki nomor pendaftaran Pangan Dalam (PD) atau Pangan Luar (PL). Jumlah PSAT yang telah terdaftar PD atau PL pada tahun tertentu.

Cara menghitung Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang telah terdaftar yaitu Jumlah PD/PL = Jumlah PD di 34 OKKPD + Jumlah PL di OKKPP

d) Health Certificate yang telah dikeluarkan

PSAT yang telah dilakukan pengujian keamanan pangan terkait parameter yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Jumlah *Health Certificate* yang diterbitkan oleh OKKP pada tahun tertentu.

Cara menghitung jumlah *Health Certificate* PSAT yaitu Jumlah HC = Jumlah HC di 34 OKKPD + Jumlah HC di OKKPP.

e) Penurunan Persentase Penduduk Rawan Pangan melalui PoU

Definisi penurunan persentase penduduk rawan pangan per tahun adalah persentase penduduk dengan konsumsi kalori per hari kurang dari 70 persen dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada tahun tertentu (y) dikurangi dengan tahun sebelumnya (y-1).

Dalam menghitung penurunan persentase penduduk rawan pangan, dengan cara : persentase penduduk rawan pangan pada tahun **y-1** dikurangi jumlah penduduk rawan pangan pada tahun **y**. Satuan penurunan persentase penduduk rawan pangan adalah persen/tahun.

f) Bencana Alam Terdampak Bidang Pertanian (Puso)

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Akibat bencana alam tersebut mengakibatkan kerusakan pada berbagai sector termasuk sector pertanian yaitu puso.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yaitu koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar. Salah satu rencana aksi yang dilaksanakan oleh BKP adalah pemantauan bencana yang terdampak bidang pertanian (puso) dan intervensi pencegahan kerawanan pangan di daerah tersebut.

Pengambilan data bersumber dari Pusat Data dan Informasi dan diolah sebagai dasar intervensi yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan.

g) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode pembobotan. Metode ini digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada

metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI (EIU 2018 dan 2019) dan GHI (IFPRI 2018 dan 2019). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement*.

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan (8) indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan.

Hasil perhitungan IKP 2020 berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (*rangking*) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah (kabupaten, kota dan provinsi) dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara umum wilayah Indonesia bagian barat memiliki nilai IKP lebih baik dibandingkan dengan Indonesia bagian timur.

h) Kelembagaan Unit Ketahanan Pangan Daerah

Data kelembagaan unit ketahanan pangan daerah dipergunakan untuk mengetahui keberadaan unit kerja ketahanan pangan atau yang menangani urusan pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Data tersebut terdiri dari nama unit kerja, alamat, no telp/fax, nama Kepala Dinas, no HP.

i) Kelembagaan OKKPD

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut OKKP adalah unit kerja di Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan pangan segar. OKKP Pusat (OKKP-P) berkedudukan pada Badan Ketahanan Pangan, sedangkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) berkedudukan di Provinsi sesuai penunjukan Gubernur, yang pada saat ini seluruh OKKP-D berada pada Dinas yang membidangi Pangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi pangan dan tuntutan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap pangan yang aman, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Di dalam peraturan tersebut, PSAT yang akan diedarkan dalam bentuk kemasan, wajib untuk didaftarkan di OKKP. Selain pendaftaran PSAT, mekanisme pengawasan pre market yang dilakukan oleh OKKP adalah pendaftaran rumah pengemasan, sertifikasi Prima dan *Health certificate*.

j) Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Prioritas Pangan (Banper)

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan prioritas pangan (bantuan pemerintah) merupakan kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat (gapoktan/kelompok tani/KWT/dan lain sebagainya) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam di sekitarnya.

Data statis dan dinamis terkait kegiatan prioritas pangan (bantuan pemerintah) diperoleh melalui aplikasi monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah Badan Ketahanan Pangan dengan laman *emonevbanper.bkp.pertanian.go.id*. Frekuensi laporan data tersebut dilakukan secara mingguan.

k) Sumberdaya Manusia Bidang Pangan berdasarkan Jabatan Fungsional

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, diperlukan sumberdaya manusia (pegawai) yang sesuai dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsional yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan yaitu Analis Ketahanan Pangan, Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Sedangkan jabatan fungsional yang dikelola oleh instansi lain tetapi mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan yaitu Statistisi, Pranata Komputer, Perencana, dan lain sebagainya.

l) Anggaran

Data anggaran Badan Ketahanan Pangan sangat diperlukan karena salah satu indikator capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan sebagai bahan perencanaan kegiatan pada periode ke depan. Data yang dikumpulkan adalah pagu anggaran dan realisasi

anggaran per satuan kerja lingkup Badan Ketahanan Pangan yang bersumber dari aplikasi Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan Anggaran Nasional (OM-SPAN) Kementerian Keuangan. Data tersebut diunduh secara harian pada laman *spanint.kemenkeu.go.id*.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

4.1. Organisasi

Tugas Badan Ketahanan Pangan yaitu menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Untuk mendukung tugas BKP tersebut, maka diperlukan kegiatan yang mengembangkan format sistem pengumpulan dan pengolahan data dan penyusunan Statistik Ketahanan Pangan, yang meliputi aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, aspek Distribusi dan Cadangan Pangan, serta aspek Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Format tersebut juga disesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan instansi terkait seperti Eselon 1 lingkup Kementan, Badan Pusat Statistik, Bulog, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud sinkronisasi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan statistik ketahanan pangan, yang meliputi:

- 1) Penyempurnaan dan pengembangan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi Ketahanan Pangan;
- 2) Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai maupun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan statistik dan informasi Ketahanan Pangan baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Mencari pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan statistik dan informasi ketahanan pangan baik di pusat maupun di daerah.

Dengan adanya sinkronisasi, diharapkan penyelenggaraan statistik dan sistem informasi ketahanan pangan akan terwujud dengan tingkat validitas dan akurasi data yang tinggi. Selain itu, akan tercipta koordinasi kegiatan pengembangan statistik dan sistem informasi ketahanan pangan yang seragam di pusat dan daerah yang mencakup kegiatan penyempurnaan dan pengembangan metode pengumpulan data, analisis, dan penyajian data, sistem informasi ketahanan pangan, dan jaringan komunikasi data serta pengembangan sumberdaya manusia.

Untuk meningkatkan kualitas data, perlu adanya upaya pemberdayaan institusi pengumpulan data terutama pada tingkat kecamatan yang mencakup sarana,

kemampuan sumberdaya manusia, dan pengurangan tugas rangkap bagi pengelola data dan informasi.

Upaya untuk menjamin kelancaran aliran data dan informasi ketahanan pangan dari kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat perlu dikembangkan suatu sistem jaringan *on-line* yang menghubungkan unit-unit kerja eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan Pusat, Badan/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta unit kerja dari berbagai sektor yang terkait sesuai kebutuhan data untuk analisis ketahanan pangan.

4.2. Tata Kerja

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengisyaratkan dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang perstatistikan untuk menyelenggarakan dan menginterpretasikan agar pengolaan data perstatistikan dapat terselenggara dengan baik dan kelancaran aliran komunikasi data dan informasi ketahanan pangan di berbagai tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat dapat terkelola dengan baik.

Pengelolaan dan penyajian data dan informasi ketahanan pangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan teknologi informasi yang tersedia.

Mekanisme pembagian tugas dalam pengelolaan data dan informasi ketahanan pangan daerah masing-masing pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat Pusat sangat diperlukan dan di atur dengan jelas dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997. Oleh sebab itu, penyediaan data ketahanan pangan sebaiknya diselenggarakan dan merupakan tanggung jawab bersama antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Pangan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hal tersebut, maka pembagian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan data dan statistik Ketahanan Pangan dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab terhadap:
 - a. Membuat rancangan format standarisasi statistik dan informasi Ketahanan

- Pangan, pengembangan konsep dan pengertian seluruh aspek ketahanan pangan;
- b. Menyelenggarakan statistik ketahanan pangan yang mencakup kegiatan program dan strategis;
 - c. Penyebar luasan konsep dan metodologi baku berdasarkan indikator ketahanan pangan;
 - d. Mensosialisasikan konsep format statistik ketahanan pangan bagi Pejabat/Petugas yang menangani statistik dan Informasi Ketahanan Pangan di Pusat, daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Menyediakan sarana penunjang dan SDM pengelola data yang kompeten di bidangnya dalam rangka penyelenggaraan statistik dan informasi ketahanan pangan.
- 2) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap:
- a. Pengelolaan penyelenggaraan statistik dan informasi Ketahanan Pangan yang dikonsentrasikan dari pusat dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Memantau perkembangan penyelenggaraan kegiatan *statistik* Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota;
 - c. Koordinasi penyelenggaraan *statistik* dan informasi ketahanan pangan antar Kabupaten;
 - d. Menyediakan sarana penunjang dan SDM pengelola data yang kompeten di bidangnya dalam rangka penyelenggaraan *statistik* dan informasi ketahanan pangan dan membentuk Tim *Statistik* Ketahanan Pangan.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab terhadap:
- a. Melaksanakan operasional pengumpulan data di tingkat Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan *statistik* dan informasi Ketahanan Pangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan provinsi;
 - b. Manajemen pengelolaan *statistik* dan informasi ketahanan pangan Kabupaten (dalam rangka otonomi daerah);
 - c. Penyebarluasan data dan informasi ketahanan pangan kepada pemakai langsung (petani, pedagang, lembaga pemerintahan maupun swasta dan masyarakat luas);

- d. Menyediakan sarana penunjang dan SDM pengelola data yang kompeten di bidangnya dalam rangka penyelenggaraan *statistik* dan informasi ketahanan pangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan *statistik* ketahanan pangan, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Penyaji Data Ketahanan Pangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tim di tingkat pusat ditetapkan melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan, sedangkan Tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan melalui SK Kepala Dinas yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Susunan Tim di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dengan struktur organisasi di Dinas Pangan di daerah masing-masing.

BAB V

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

5.1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah. Pemantauan dilakukan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, *updating*, dan pengolahan data ketahanan pangan yang meliputi data dan informasi ketahanan pangan. Pemantauan dilakukan secara periodik 1 bulan sekali mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai pada tingkat kabupaten/kota, atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sebagai bahan untuk upaya tindak lanjut program kegiatan selanjutnya dan bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

5.2. Pembinaan

Pembinaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti workshop, konsolidasi, dan sosialisasi, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pimpinan dan kebutuhan. Pengawasan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan di Badan Ketahanan Pangan. Pengawasan dilakukan secara internal pada dinas pangan provinsi dan kabupaten/kota melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI).

5.3. Pelaporan

Pelaporan perkembangan kegiatan ketahanan pangan yang dihimpun dalam bentuk *statistik* dan informasi ketahanan pangan dilaporkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai di tingkat Pusat. Bentuk laporan dibuat secara berkala yaitu laporan bulanan, semesteran, dan tahunan.

Data-data dan laporan yang telah dihimpun dan disusun oleh setiap Dinas Pangan Daerah (Provinsi) harus dilaporkan secara periodik ke Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian c.q Subkelompok Data dan Informasi pada Kelompok Substansi Evaluasi, Data dan Informasi serta Hubungan Masyarakat melalui email: evalap.bkp@pertanian.go.id atau fax no (021) 7807377.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA Badan Ketahanan Pangan Tahun 2021. Kegiatan serupa diharapkan dapat dianggarkan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengelolaan dana untuk kegiatan penyusunan, pengumpulan, pengolahan, updating, analisis data ketahanan pangan dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang meliputi:

- a) Pembentukan Tim Pengelola dan Penyaji Data Ketahanan Pangan yang diterbitkan oleh Kepala Satker.
- b) Rapat Internal Tim yang dihadiri oleh Pejabat/Petugas Data dari Pusat-pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.
- c) Inventarisasi data dan penyusunan format statistik Ketahanan pangan sebagai bahan pemantauan ke lapangan.
- d) Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengumpulan dan validasi data ketahanan pangan.
- e) Workshop Statistik Ketahanan Pangan dengan peserta adalah Pejabat/Petugas yang ditunjuk menangani data lingkup Badan Ketahanan Pangan di tingkat pusat dan provinsi. Pertemuan statistik ketahanan pangan di tingkat provinsi dapat mengundang pejabat/petugas yang menangani data Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten/kota.
- f) Menyusun Buku Statistik Ketahanan Pangan yang diterbitkan setiap tahun.

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2021 ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan updating statistik ketahanan pangan di Badan Ketahanan Pangan Pusat maupun Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan pengelolaan statistik ketahanan pangan baik di pusat maupun di daerah dapat lebih terbaharui, akurat, realistis, akuntabel, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan di pusat dan daerah.

LAMPIRAN

Tabel 1. Perkembangan Ketersediaan Komoditas Pangan Pokok / Strategis (5 Tahun Terakhir)

Komoditas	Ketersediaan Per Tahun *) (Ton)					Pertumbuhan Per Tahun (%)	
	Tahun .. 2	Tahun .. 3	Tahun .. 4	Tahun .. 5	Tahun .. 6	5 Tahun Terakhir 7	2 Tahun Terakhir 8
Pangan Nabati Padi Jagung Kedelai Gula Pasir Minyak Goreng Bawang Merah Bawang Putih Cabai Besar Cabai Rawit							
Pangan Hewani Daging Sapi Daging Ayam Ras Telur Ayam Ras							

Ket. :

*) Perkembangan Produksi Lima Tahun Terakhir

Tabel 2a. Neraca Ketersediaan Beras

Bulan	Produksi Beras	Penggunaan Beras Non Pangan	Kebutuhan Beras			Neraca Domestik (Bulanan)	Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
			Konsumsi Langsung (Rumah Tangga)	Konsumsi Tidak Langsung (Horeka, Industri, dll)	Total		
1	2	3	4	5	6=4+5	8=stok awal+7	
Stok Awal							
Jumlah							

Keterangan:

- Produksi padi berupa GKG (BPS) dikurangi penggunaan GKG sebesar 7,3%, terdiri dari : benih 0,9%; pakan ternak 0,4%; industri non pangan 0,6%; susut/tercecer gabah 5,4%, dengan konversi GKG menjadi beras sebesar 64,02%.
- Penggunaan beras non pangan sebesar 3,33%, terdiri dari: pakan ternak 0,17%; industri non makanan 0,66% dan susut/tercecer beras 2,5%.
- Kebutuhan beras sebesar 111.,8kg/kap/th (KSA 2018 BPS), terdiri dari konsumsi langsung tingkat rumah tangga 94,47kg/kap/th (**Susenas Triwulan I, 2020**) dan konsumsi tidak langsung merupakan selisih antara total kebutuhan dikurangi konsumsi langsung rumah tangga.

Tabel 2b. Neraca Ketersediaan Jagung

(Ton)

Bulan	Produksi JPK ka 20-25%	Produksi JPK (koreksi 72%)	Produksi (JPK ka 15%)	Perkiraan Kebutuhan						Neraca Bulanan	Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)	
				Kehilangan / Tercecer	Benih	Konsumsi Langsung	Industri Pakan	Pakan (Peternak Lokal)	Industri Pangan			Total
1	2	3 = 72%*2	4 = 87%*3	5	6	7	8	9	10	11	12=4-11	13=stok awal + 12
Stok Awal												
Total												

Keterangan:

- a. Produksi jagung (BPS)
- b. Tercecer/ Kehilangan sebesar 7,16 % dari produksi JPK dengan kadar air 15 % (NBM Tahun 2019)
- c. Kebutuhan jagung dari Konsumsi langsung Rumah Tangga 1,67kg/kap/th (**Susenas Triwulan I, 2020**)

Tabel 2c. Neraca Ketersediaan Kedelai

Bulan	Perkiraan Produksi	Perkiraan Kebutuhan						Perkiraan Neraca Domestik	Perkiraan Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
		Kehilangan / Tercecer	Benih	Konsumsi Langsung RT	Horeka, RM dan PMM	Industri (Besar, Sedang, Mikro Kecil)	Total		
1	2	3=5%*2	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	10= stok awal+9	
Stok Awal									
Total									

Keterangan:

- Produksi kedelai (BPS)
- Tercecer/ Kehilangan sebesar 5% dari produksi (NBM dan BPS)
- Kebutuhan terdiri dari konsumsi langsung RT 0,05kg/kap/th;horeka sebesar 0,37 kg/kap/thn dan kebutuhan industri sebesar 11,47 kg/kap/thn(**Survei Bahan Pokok BPS 2017**).

Tabel 2d. Neraca Ketersediaan Gula Pasir

Bulan	Produksi	Kebutuhan				Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
		Konsumsi Langsung RT	Horeka, RM, dan PMM	Jasa Lainnya (Jasa Kesehatan dan Kebutuhan Lainnya)	Total		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	8=stok awal+7	
Stok Awal							
Total							

Keterangan:

- a. Produksi gula pasir (BPS)
- b. Kebutuhan gula pasir dari: (1) Konsumsi langsung rumah tangga 6,81 kg/kap/th (**Susenas Triwulan I, 2020**) BPS-BKP Kementan; (2) Kebutuhan RM dan Horeka sebesar 3,34 kg/kap/th (Survei Bahan Pokok BPS 2017); dan (3) Kebutuhan lainnya 0,07 kg/kap/tah (**Survei Bahan Pokok BPS, 2017**) - Ditjen Perkebunan Kementan

Tabel 2e. Neraca Ketersediaan Minyak Goreng

Bulan	Produksi	Kebutuhan			Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
		Kehilangan / Tercecer	Konsumsi Langsung	Industri		
1	2	3=1,56%*(2)	4	5	7=2-3-6	8= stok awal+7
Stok Awal						
Total						

Keterangan:

- a. Produksi minyak goreng (BPS, GAPKI dan AIMMI)
- b. Tercecer/ Kehilangan sebesar 1,56% dari produksi (NBM, 2019)
- c. Konsumsi langsung sebesar 8,82 kg.kap/thn (Susenas Triwulan I, 2020)

Tabel 2f. Neraca Ketersediaan Bawang Merah

(Ton)

Bulan	Produksi	Kebutuhan						Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus /Defisit)
		Kehilangan / Tercecer	Benih / Bibit	Konsumsi Langsung (RT)	Horeka, RM dan PMM	Industri	Ekspor		
1	2	3	4	5	6	7	8	10=2-9	11= stok awal+10
Stok Awal									
Total									

Keterangan:

- a. Produksi bawang merah (BPS)
- b. Kebutuhan bawang merah dari Konsumsi langsung rumah tangga sebesar 2.802 kg/kap/th (**SUSENAS Triwulan I,2020**)
- c. Kebutuhan benih sebesar 12,92 % x luas tanam; kebutuhan horeka sebesar 5 % x konsumsi RT; industri sebesar 5%x konsumsi RT dan kehilangan(tercecer) merupakan penjumlahan dari penyediaan konsumsi, horeka, industri. Ekspor dan benih) (Estimasi Ditjenbun Kementan)

Tabel 2g. Neraca Ketersediaan Bawang Putih

Bulan	Produksi	Kebutuhan						Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus /Defisit)
		Kehilangan / Tercecer	Benih / Bibit	Konsumsi Langsung (RT)	Horeka, RM dan PMM	Industri	Ekspor		
1	2	3	4	5	6	7	8	10=2-9	11= stok awal+10
Stok Awal									
Total									

Keterangan:

- Produksi bawang putih (BPS)
- Kebutuhan bawang putih dari Konsumsi langsung rumah tangga sebesar 1,806kg/kap/th (**SUSENAS Triwulan I,2020**)
- Kebutuhan benih sebesar 0,5 x luas tanam; kebutuhan horeka sebesar 10 % x konsumsi RT;industri sebesar 5%x konsumsi RT dan kehilangan(tercecer) merupakan penjumlahan dari penyediaan konsumsi, horeka dan industri) (Estimasi Ditjenbun Kementan)

Tabel 2h. Neraca Ketersediaan Cabai Besar

Bulan	Produksi	Kebutuhan						Total	Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus /Defisit)
		Kehilangan / Tercecer	Benih / Bibit	Konsumsi Langsung (RT)	Horeka, RM dan PMM	Industri	Ekspor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	10=2-9	11= stok awal+10
Stok Awal										
Total										

Keterangan:

- Produksi cabai besar (BPS)
- Stok awal tidak diperhitungkan karena komoditi cabai besar tidak bertahan lama untuk disimpan
- Kehilangan/tercecer merupakan angka Estimasi perhitungan Ditjen Hortikultura,
- Kebutuhan cabai besar dari Konsumsi langsung rumah tangga sebesar 2,364kg/kap/th (**Susenas Triwulan I, 2020**), benih sebesar 0,24% x luas tanam; horeka sebesar 25% x konsumsi RT; kebutuhan industri 20% x konsumsi RT.

Tabel 2i. Neraca Ketersediaan Cabai Rawit

Bulan	Produksi	Kebutuhan						Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus /Defisit)
		Kehilangan/ Tercecer	Benih/ Bibit	Konsumsi Langsung (RT)	Horeka, RM dan PMM	Industri	Ekspor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8	11= stok awal+10
Stok Awal									
Total									

Keterangan:

- a. Produksi cabai rawit (BPS)
- b. Stok awal tidak diperhitungkan karena komoditi cabai rawit tidak bertahan lama untuk disimpan
- c. Kehilangan/tercecer merupakan angka estimasi perhitungan Ditjen Hortikultura
- e. Kebutuhan cabai rawit dari Konsumsi langsung rumah tangga 1,99 kg/kap/th (**Susenas Triwulan I, 2020**),benih sebesar 0,29% x luas tanam; horeka sebesar 34% x konsumsi RT; kebutuhan industri 25% x konsumsi RT.

Tabel 2j . Neraca Ketersediaan Daging Sapi dan Kerbau

Bulan	Produksi	Kebutuhan	Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus/Defisit)
1	2	3	4=2-3	5= stok awal + 4
Stok Awal				
Jumlah				

Keterangan:

- a. Produksi daging sapi dan kerbau (BPS)
- b. Kebutuhan daging sapi dan kerbau sebesar 2,66 kg/kap/thn (Keputusan Rakornis Kemenko Perekonomian, 2019)

Tabel 2k. Neraca Ketersediaan Daging Ayam Ras

Bulan	Produksi	Kebutuhan					Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus /Defisit)
		Konsumsi Langsung (RT)	Horeka, RM dan PMM	Industri	Jasa Kesehatan	Total		
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=2-7	9= stok awal+8
Stok Awal								
Total								

Keterangan:

- a. Produksi daging ayam ras (BPS)
- b. Kebutuhan daging ayam ras sebesar 12,79 kg/kap/thn;konsumsi langsung sebesar 5,47 kg/kap/thn;horeka sebesar 6,08 kg/kap/thn ;industri 1,21 kg/kap/thn dan jasa kesehatan sebesar 0,03kg/kap/thn (BPS dalam Rakor Perunggasan Kemenko Perekonomian, 2020)

Tabel 21. Neraca Ketersediaan Telur Ayam Ras

Bulan	Produksi	Kebutuhan					Total	Neraca Domestik	Neraca Kumulatif (Surplus /Defisit)
		Konsumsi Langsung (RT)	Horeka, RM dan PMM	Industri	Jasa Kesehatan				
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8=2-7	9= stok awal+8	
Stok Awal									
Total									

Keterangan:

- Produksi telur ayam ras (BPS)
- Kebutuhan bersumber dari BPS/Instansi Terkait
- Kebutuhan telur ayam ras 17,69 kg/kap/th;konsumsi langsung sebesar 6,49 kg/kap/thn;horeka sebesar 5,52 kg/kap/thn ;industri 5,61 kg/kap/thn dan jasa kesehatan sebesar 0,073kg/kap/thn (Rakor Supply demand, 2020)

Tabel 3. Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan

No	Konsumsi	Tahun			
		20..	20..	20..	20..
1	Energi (kkal/kap/hari)				20..
2	Tingkat Kecukupan Energi (% AKE)				
3	Protein (gram protein/kap/hari)				
4	Tingkat Kecukupan Protein (% AKP)				
5	Skor PPH				

Tabel 4. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis

No	Komoditas	Perkiraan Ketersediaan					Perkiraan Kebutuhan	Neraca s.d
		Stok Akhir	Produksi Dalam Negeri	Redistribusi/ Realokasi	Realisasi Impor	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9 = 7 - 8
1	Beras							
2	Jagung							
3	Bawang Merah							
4	Bawang Putih							
5	Cabai Besar/Keriting							
6	Cabai Rawit							
7	Daging Sapi/Kerbau							
8	Daging Ayam Ras							
9	Telur Ayam Ras							
10	Gula Pasir							
11	Minyak Goreng							

Tabel 5a. Monitoring Stok Gabah dan Beras di Penggilingan Mingguan

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 BULAN :
 MINGGU KE- / TANGGAL : I, II, III, IV, V / Senin, Tgl.....

No. Penggilingan	Kumulatif Volume Gabah yang Digiling (Kg) a)	Gabah Kering Panen (GKP)		Gabah Kering Giling (GKG)		Beras Medium		Beras Premium		Gabah dibeli dari ^{e)}		Beras dijual ke f)	
		Stok (Kg) b)	Rata-Rata Harga Beli (Rp/Kg) c)	Stok (Kg) b)	Rata-Rata Harga Beli (Rp/Kg) c)	Stok (Kg) b)	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) c)	Stok (Kg) b)	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) c)	Asal Kab / Kota/ Prov	%	Kab /Kota/ Prov	Tujuan %
1													
2													
dst													

Keterangan:

- a. **Kumulatif volume gabah yang digiling adalah** jumlah kumulatif gabah yang digiling menjadi beras selama satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini).
- b. **Stok gabah/beras di penggilingan** adalah jumlah gabah/beras yang dimiliki/dikuasai oleh penggilingan tersebut dalam satu hari (Senin setiap minggu) dan tidak termasuk stok milik petani ataupun pedagang yang berada di penggilingan.
- c. **Rata-rata harga gabah di penggilingan** adalah rata-rata harga beli gabah (GKG atau GKP) dari petani satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini).
- d. **Rata-rata harga beras di penggilingan** adalah rata-rata harga jual beras hasil giling ke pembeli (pedagang/konsumen) satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini).
- e. **Gabah dibeli dari:** (1) Kab/Kota setempat; (2) Luar kab/Kota satu provinsi, sebutkan.....; (3) Luar provinsi, sebutkan (Kabupaten/kota /provinsi boleh lebih dari satu)
- f. **Beras dijual ke :** (1) Kab/Kota setempat; (2) Luar kab/Kota satu provinsi, sebutkan.....; (3) Luar provinsi, sebutkan (Kabupaten/kota /provinsi boleh lebih dari satu)

Tanggal.....

TTD

(Nama enumerator)

Tabel 5b. Rekapitulasi Data Dan Informasi Provinsi Monitoring Stok Gabah Dan Beras Di Penggilingan

PROVINSI :
 BULAN :
 MINGGU KE- / TANGGAL : I, II, III, IV, V / Senin, Tgl.....

No.	Kabupaten/ Kota	Kumulatif Volume Gabah yang Digiling (Kg) a)	Gabah Kering Panen (GKP)		Gabah Kering Giling (GKG)		Beras Medium		Beras Premium		Gabah dibeli dari ^e		Beras dijual ke f)	
			Stok (Kg) b)	Rata-Rata Harga/Beli (Rp/Kg) c)	Stok (Kg) b)	Stok (Kg) b)	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) c)	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) c)	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) c)	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) c)	Asal Kab /Kota/ Prov	%	Kab/ Kota/ Prov Tujuan	%
1														
2														
dst														

Tanggal.

TTD

(Nama koordinator)

Tabel 5c. Rekapitulasi Data dan Informasi Nasional Stok Gabah dan Beras di Penggilingan

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Enumerator	No HP Enumerator	Kecamatan	Desa	Nama Penggilingan	Alamat	Strata Kabupaten	Kapasitas Penggilingan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
dst										
1000										

(Lanjutan Tabel Entry Data)

No	Kumulatif Volume Gabah yang Digiling (Kg)	Stok GKP (Kg)	Rata-rata Harga Beli GKP (Rp/Kg)	Stok GKP (Kg)	Rata-rata Harga Beli GKG (Rp/Kg)	Stok GKG (Kg)	Rata-rata Harga Beli GKG (Rp/Kg)	Stok Beras (Kg)	Rata-rata Harga Jual Beras (Rp/Kg)	Daerah Asal Gabah	%	Tujuan pemasaran beras	%
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1													
2													
3													
dst													
1000													

Keterangan :

- Kumulatif volume gabah yang digiling adalah** jumlah kumulatif gabah yang digiling menjadi beras selama satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini).
- Stok gabah/beras di penggilingan** adalah jumlah gabah/beras yang dimiliki/dikuasai oleh penggilingan tersebut dalam satu hari (Senin setiap minggu) dan tidak termasuk stok milik petani ataupun pedagang yang berada di penggilingan.
- Rata-rata harga gabah di penggilingan** adalah rata-rata harga beli gabah (GKG atau GKP) dari petani satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini).
- Rata-rata harga beras di penggilingan** adalah rata-rata harga jual beras hasil giling ke pembeli (pedagang/konsumen) satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini).
- Gabah dibeli dari:** (1) Kab/Kota setempat; (2) Luar kab/Kota satu provinsi, sebutkan.....; (3) Luar provinsi, sebutkan (Kabupaten/kota /provinsi boleh lebih dari satu)
- Beras dijual ke :** (1) Kab/Kota setempat; (2) Luar kab/Kota satu provinsi, sebutkan.....; (3) Luar provinsi, sebutkan (Kabupaten/kota /provinsi boleh lebih dari satu)

Tabel 6a. Monitoring Stok Beras Di Pedagang Tahun

PROVINSI :
 KABUPATEN :
 BULAN :
 MINGGU KE- / TANGGAL : I, II, III, IV, V / Senin, Tanggal.....

No.	Nama Tempat Usaha/ Pedagang	Beras Medium			Beras Premium			Daerah Asal Pembelian Beras		Daerah Tujuan Penjualan Beras					
		Stok (Kg) ^a	Jumlah Pembelian Beras (Kg) ^b	Rata-Rata Harga Beli (Rp/Kg) ^c	Jumlah Penjualan Beras (Kg) ^d	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) ^e	Stok (Kg) ^a	Jumlah Pembelian Beras (Kg) ^b	Rata-Rata Harga Beli (Rp/Kg) ^c	Jumlah Penjualan Beras (Kg) ^d	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) ^e	Asal Kab/Kota/Prov ^f	%	Kab/Kota/Prov Tujuan ^g	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1															
2															
dst															

Keterangan:

- Stok beras di tempat usaha pedagang** adalah jumlah beras yang dimiliki/dikuasai oleh pedagang tersebut dalam satu hari (Senin setiap minggu)
- Jumlah pembelian beras** adalah jumlah beras yang dibeli oleh pedagang satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini)
- Rata-rata harga beli beras di pedagang** adalah rata-rata harga beli beras satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini)
- Jumlah penjualan beras** adalah jumlah beras yang dijual oleh pedagang satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini)
- Rata-rata harga jual beras di pedagang** adalah rata-rata harga jual beras satu minggu yang lalu (mulai hari Senin minggu lalu sampai dengan hari Minggu minggu ini)
- Daerah asal pembelian beras:** (1) Kab/Kota setempat; (2) Luar kab/Kota satu provinsi, sebutkan.....; (3) Luar provinsi, sebutkan (Kabupaten/kota/provinsi boleh lebih dari satu)
- Daerah tujuan penjualan beras:** (1) Kab/Kota setempat; (2) Luar kab/Kota satu provinsi, sebutkan.....; (3) Luar provinsi, sebutkan (Kabupaten/kota/provinsi boleh lebih dari satu)

Tanggal....

TTD

(Nama enumerator)

Tabel 6b. Rekapitulasi Data Dan Informasi Provinsi Monitoring Stok Beras Di Pedagang Tahun

PROVINSI :
 BULAN :
 MINGGU KE- / TANGGAL : I, II, III, IV, V / Senin, Tgl.....

No.	Kabupaten/ Kota	Beras Medium				Beras Premium				Daerah Asal Pembelian Beras		Daerah Tujuan Penjualan Beras			
		Stok (Kg) ^a	Jumlah Pembelian Beras (Kg) ^b	Rata- Rata Harga Beli (Rp/Kg) ^c	Jumlah Penjualan Beras (Kg) ^d	Rata- Rata Harga Jual (Rp/Kg) ^e	Stok (Kg) ^a	Jumlah Pembelian Beras (Kg) ^b	Rata- Rata Harga Beli (Rp/Kg) ^c	Jumlah Penjualan Beras (Kg) ^d	Rata-Rata Harga Jual (Rp/Kg) ^e	Asal Kab/Kota/Prov ^f	%	Kab/Kota/Prov Tujuan ^g	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
dst															

Tanggal..... 20....

TTD
 (Nama koordinator)

Tabel 7. Distribusi Total Stok Setara Beras Berdasarkan Kapasitas Penggilingan Tahun

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Stok Setara Beras			Total Stok
		Besar	Sedang	Kecil	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
dst					
TOTAL					

Tabel 8. Total Stok Beras Per Provinsi di Masing-Masing Skala Usaha Pedagang Tahun

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Total Stok (Ton)				Jumlah
		Besar	Menengah	Kecil	Mikro	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
dst						
Grand Total						

Tabel 9a. Cadangan Pangan Pemerintah Persediaan Beras

Provinsi :

Tahun :

Bulan :

(Ton)

No	Uraian	Jumlah
I	Stok Awal	
II	Penerimaan	
III	Stok dikuasai (I + II)	
IV	Pengeluaran	
V	Jumlah Persediaan (III - IV)	

Sumber : Sub Divre BULOG Provinsi

Tabel 9b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Persediaan Beras

Provinsi :

Tahun :

Bulan :

(Ton)

No	Uraian	Jumlah
I	Stok Awal	
II	Penerimaan	
III	Stok dikuasai (I + II)	
IV	Pengeluaran	
V	Jumlah Persediaan (III - IV)	

Sumber : Dinas Pangan Provinsi

Tabel 9c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Persediaan Beras

Kabupaten/Kota :

Tahun :

Bulan :

(Ton)

No	Uraian	Jumlah
I	Stok Awal	
II	Penerimaan	
III	Stok dikuasai (I + II)	
IV	Pengeluaran	
V	Jumlah Persediaan (III - IV)	

Sumber : Dinas Pangan Provinsi

Tabel 9d. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Persediaan Beras

Masyarakat :

Tahun :

Bulan :

(Ton)

No	Uraian	Jumlah
I	Stok Awal	
II	Penerimaan	
III	Stok dikuasai (I + II)	
IV	Pengeluaran	
V	Jumlah Persediaan (III - IV)	

Sumber : Dinas Pangan Provinsi

Tabel 10. Cadangan Pangan Strategis di Divre Bulog

Tahun :

Bulan :

(Ton)

No	Uraian Komoditas	Jumlah
1	Beras	
2	Gula Pasir	
3	Jagung	
4	Daging Sapi	
5	Bawang Merah	
6	Daging Kerbau	
7	Tepung Terigu	
8	Telur	
9	Minyak Goreng	
10	Bawang Putih	

Sumber : Divre Bulog Provinsi

Tabel 11a. Pemantauan Harga Pangan Pokok di Tingkat Produsen

Provinsi :
Tahun :

No	Komoditas	Harga (Rp/Kg)	Keterangan
1	Gabah		
	- GKP Petani		
	- GKG Penggilingan		
2	Beras		
	- Penggilingan		
	- Medium		
	- Premium		
3	Jagung Pipilan Kering		
4	Kedelai Biji Kering		
5	Ubi Kayu		
6	Ubi Jalar		
7	Cabe		
	- Merah Besar		
	- Merah Keriting		
	- Rawit Merah		
8	Bawang Merah		
9	Daging Sapi		
	- Berat Hidup		
	- Karkas		
10	Daging Kerbau		
	- Berat Hidup		
	- Karkas		
11	Daging Ayam Ras		
	- Berat Hidup		
	- Daging		
12	Telur Ayam Ras		

Tabel 11b. Pemantauan Harga Pangan Pokok di Tingkat Konsumen

Provinsi :

Tahun :

No	Komoditas	Harga (Rp/Kg)	Keterangan
1	Beras		
	- Premium		
	- Medium		
	- Termurah		
2	Jagung Pipilan Kering		
3	Kedelai		
	- Lokal		
	- Impor		
4	Gula Pasir		
	- Lokal		
	- Impor		
5	Minyak Goreng		
	- Kemasan		
	- Curah		
6	Cabe		
	- Merah Besar		
	- Merah Keriting		
	- Rawit Merah		
7	Bawang Merah		
8	Bawang Putih		
	- Kating		
	- Biasa		
9	Daging Sapi		
	- Has		
	- Murni		
10	Daging Kerbau		
	- Has		
	- Murni		
11	Daging Ayam Ras		
12	Telur Ayam Ras		

Tabel 12a. Rata-rata Harga Pangan Pokok di Tingkat Produsen (5 Tahun Terakhir)
Provinsi :

No	Komoditas	Harga (Rp/Kg)				
		Tahun ..	Tahun ..	Tahun ..	Tahun ..	Tahun ..
1	Gabah					
	- GKP Petani					
	- GKG Penggilingan					
2	Beras					
	- Penggilingan					
	- Medium					
	- Premium					
3	Jagung Pipilan Kering					
4	Kedelai Biji Kering					
5	Ubi Kayu					
6	Ubi Jalar					
7	Cabe					
	- Merah Besar					
	- Merah Keriting					
	- Rawit Merah					
8	Bawang Merah					
9	Daging Sapi					
	- Berat Hidup					
	- Karkas					
10	Daging Kerbau					
	- Berat Hidup					
	- Karkas					
11	Daging Ayam Ras					
	- Berat Hidup					
	- Daging					
12	Telur Ayam Ras					

Tabel 12b. Rata-rata Harga Pangan Pokok di Tingkat Konsumen (5 Tahun Terakhir)
Provinsi :

No	Komoditas	Harga (Rp/Kg)				
		Tahun ..	Tahun..	Tahun ..	Tahun ..	Tahun ..
1	Beras					
	- Premium					
	- Medium					
	- Termurah					
2	Jagung Pipilan Kering					
3	Kedelai					
	- Lokal					
	- Impor					
4	Gula Pasir					
	- Lokal					
	- Impor					
5	Minyak Goreng					
	- Kemasan					
	- Curah					
6	Cabe					
	- Merah Besar					
	- Merah Keriting					
	- Rawit Merah					
7	Bawang Merah					
8	Bawang Putih					
	- Kating					
	- Biasa					
9	Daging Sapi					
	- Has					
	- Murni					
10	Daging Kerbau					
	- Has					
	- Murni					
11	Daging Ayam Ras					
12	Telur Ayam Ras					

Tabel 13. Jumlah Pasokan (Keluar Masuk Barang) Komoditas Pangan Prioritas Tahun ..

Nama Satker :
Provinsi :

No	Komoditas	Jumlah Pasokan Masuk			Jumlah Keluar		
			Asal	Volume (ton)		Tujuan	Volume (ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Beras	1	Prov		1	Prov	
		2	Prov		2	Prov	
		3	Prov		3	Prov	
		4	Prov		4	Prov	
		5	Wilayah Lain		5	Wilayah Lain	
2	Dst...	1	Prov		1	Prov	
		2	Prov		2	Prov	
		3	Prov		3	Prov	
		4	Prov		4	Prov	
		5	Wilayah Lain		5	Wilayah Lain	

Tabel 15. Perkembangan Konsumsi Pangan (5 Tahun Terakhir)

No	Konsumsi	Tahun				
		20..	20..	20..	20..	20..
1	Energi (kkal/kap/hari)					
2	Tingkat Kecukupan Energi (% AKE)					
3	Protein (gram protein/kap/hari)					
4	Tingkat Kecukupan Protein (% AKP)					
5	Skor PPH					

Tabel 18. Hasil Uji Laboratorium Keamanan Pangan Beberapa Komoditas Penting

Propinsi :
Tahun :

No	Kabupaten/Kota	Sampel				Tidak terdeteksi
		Terdeteksi		BMR (ppm)	(6)	
		Komoditas	Residu (ppm)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

Keterangan :
BMR = Batas Maksimum Residu

Tabel 19. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan Daerah (OKKP-P dan OKKP-D)

Propinsi :
Tahun :

No.	Unit/Pelaku	Alamat	Komoditi	No. Sertifikat

Tabel 22. Toko Tani Indonesia (TTI)/Pasar Mitra Tani (PMT)

Nama Satker :
Provinsi :

No	Kabupaten/ Kota	Nama Toko	Nama Pemilik	Alamat TTI	Jenis Kepemilikan Toko	Tahun Berdiri	Ukuran Toko/Kios (m ²)	Jenis Komoditi	Jumlah Pasokan (kg)	Jumlah Komoditi Yg Terjual (Kg)	Jumlah Stok Saat Ini (kg)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Tabel 25. Total Anggaran Per Kegiatan

Nama Satker :
Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Keterangan:
Kolom 3- 6 diisi berdasarkan jumlah besaram anggaran total per kegiatan (Rp)

Tabel 26a. Jumlah Volume dan Anggaran Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Nama Satker :
Provinsi :

No	Kabupaten/Kota	Koordinasi		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Data dan Informasi Publik		Total	
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)

Keterangan : kolom volume diisi berdasarkan jumlah sasaran

Tabel 27. Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah

No	Prov/Kab/Kota	Nama Satker	Alamat Satker	Jumlah SDM yang Menangani Ketahanan Pangan		
				AKP	APHP	PMHIP



BADAN KETAHANAN PANGAN

Kantor Pusat Kementerian Pertanian

Gedung E Lantai 2,3,4,6

Jl. Harsono RM No 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12550

Tlp: (021) 7802619/7807377 Fax: (021) 7807377

Website: <http://www.bkp.pertanian.go.id>